

Lembaga Keuangan Mikro dan Kemiskinan

Tasya Aspiranti*

Abstrak

LKM berdampak signifikan untuk mempromosikan masyarakat miskin dan membantu mereka keluar dari kemiskinan. Meskipun demikian, di berbagai Negara dengan berbagai variasinya, bentuk LKM perlu diinovasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Pola LKM di setiap Negara berbeda, disebabkan pola di suatu daerah belum tentu sesuai untuk daerah lainnya. LKM mempunyai kekuatan besar yaitu dapat beradaptasi dan menemukan cara untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapinya. Hal ini juga memperlihatkan bahwa masyarakat miskin bukan untuk disumbang tetapi mereka merupakan nasabah potensial yang membutuhkan jasa pelayanan. Hal ini pun menjawab pertanyaan mengapa LKM lebih berhasil dibandingkan dengan bentuk-bentuk sumbangan. LKM merupakan solusi penghapusan kemiskinan dari bawah. LKM tidak didesain oleh para perencana di tingkat pemerintah, tetapi dilakukan oleh para profesional untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Kata kunci: lembaga keuangan mikro, kemiskinan

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan yang melayani populasi masyarakat miskin yang tidak dapat dilayani oleh lembaga keuangan formal. Menurut data Bank Dunia, sekitar 1,1 milyar penduduk dunia merupakan penduduk sangat miskin dengan pendapatan kurang dari 1US \$per hari dan 2,7 milyar penduduk dunia (40 % dari total penduduk) merupakan penduduk miskin dengan pendapatan kurang dari 2 US \$ per hari. Penduduk sangat miskin tersebar di Negara - Negara berkembang, yaitu 9 % di Asia Timur dan Asia Pasifik dan 41 % di Afrika.

Menurut data tahun 2006, di Asia, rata- rata pinjaman yang diberikan LKM sekitar USD 149, di Afrika Utara, Timur Tengah sekitar USD 263, di Amerika Latin dan Karibia sekitar USD 678, di Afrika sekitar 235, di Afrika sekitar USD 235 sedangkan di Eropa Timur dan Asia Tengah sekitar USD 1597. (Deutsche Bank, Desember 2007). Di berbagai negara mempunyai kesamaan yaitu LKM dimulai dengan penawaran jasa deposit mikro dan jasa asuransi mikro kepada para nasabahnya. Nasabah LKM di antaranya adalah penjual mikro, nelayan, petani, dan beragam pengusaha mikro lainnya.

* Penulis adalah Dosen Tetap Program Studi Manajemen Fakultas Ekonorni Universitas Islam Bandung

LKM dapat berwujud berbagai jenis organisasi seperti Non Government Organization (Lembaga Non Pemerintah), koperasi, lembaga keuangan khusus, bank khusus atau bagian dari perbankan. LKM didirikan dengan suatu keyakinan bahwa pengusaha mikro adalah pengusaha yang beretika dan pada prinsipnya layak untuk mendapat kredit. Bagi para pengusaha mikro, terkadang LKM merupakan satu - satunya alternative yang terjangkau untuk perolehan kredit. Di Philipina misalnya, rentenir memberi bunga sampai dengan 1000 % per tahun, sedangkan LKM dapat member bunga 15 % - 70% per tahun. Meskipun bagi negara maju, bunga dengan tingkat tersebut masih cukup tinggi, tetapi ini dapat dipahami karena kecilnya jumlah pinjaman dan tingginya biaya prosedur peminjaman (prosedur peminjaman terhadap pengusaha mikro cukup rumit disebabkan usaha yang berskala mikro). Diperkirakan biaya prosedur peminjaman mencapai dua pertiga dari bunga yang dibayar nasabah, belum lagi risiko pinjaman tidak tertagih. (Deutsche Bank Research, December 2007)

LKM merupakan fasilitator kunci untuk mengentaskan kemiskinan baik di negara berkembang maupun di negara maju. LKM sejak pertengahan 1970an sudah dikenal di Asia Selatan dan Amerika Latin. Di Asia, sebagian besar peminjam (99%) adalah wanita (Asian Microfinance 2005). Hal ini menunjukkan bahwa wanita merupakan debitur yang relatif aman (risiko rendah) bagi LKM disebabkan wanita cenderung mempunyai ikatan yang kuat dengan keluarga, bekerja tidak jauh dengan keluarga sehingga biaya monitoring LKM terhadap nasabahnya menjadi lebih rendah. LKM pun banyak diberikan kepada nasabah yang berkelompok. Setiap anggota kelompok diharapkan mempengaruhi anggota lainnya untuk menjadi debitur yang baik dan turut membantu jika salah seorang anggota menemui kesulitan membayar. Intensitas pertemuan antar anggota kelompok, transparansi antar anggota, dorongan dari anggota lain dalam kelompok sangat membantu anggota kelompok untuk menjadi debitur yang baik. Efektivitas pinjaman kelompok terutama untuk nasabah di pedesaan di mana control social masih sangat tinggi. LKM pedesaan yang mayoritas nasabahnya adalah kelompok wanita dan dianggap berhasil adalah Grameen Bank. Grameen Bank didirikan oleh Muhammad Yunus, seorang Profesor Ekonomi dari University of Chittagong Bangladesh. Grameen Bank mulai meminjamkan pinjaman sebesar USD 27 untuk 42 orang yang tergabung dalam kelompok di desa Jobra Bangladesh. Sesudah tiga puluh tahun, sejak didirikan tahun 1976, Grameen Bank mempunyai 2431 cabang dengan karyawan lebih dari 16000 orang dan mampu menjangkau 78659 desa di Bangladesh. Hingga pertengahan tahun 2007 jumlah nasabahnya mencapai 7.208.455 orang dan 96,6 % nya adalah wanita dengan pinjaman melebihi 6.3 milyar USD.

Kesuksesan Grameen Bank di Bangladesh kemudian banyak dijadikan model peminjaman di berbagai negara di dunia. Pada saat ini LKM sudah mendunia dan bahkan tahun 2005 dijadikan tahun mikro kredit dalam upaya mempromosikan manfaat dan potensi LKM. Penguatan LKM bukan oleh faktor eksternal melainkan oleh faktor internal yaitu para anggotanya. Pinjaman kredit mikro diakui sebagai alat pengembangan ekonomi berskala besar di negara-negara yang menerapkannya. Pada tahun 2006, Prof. Yunus dan Grameen Bank dianugerahi hadiah nobel untuk upaya "Pengembangan ekonomi dan sosial melalui masyarakat lapisan bawah".

Grameen Bank meyakini bahwa bantuan (charitas) bukan solusi kemiskinan, tetapi membantu masyarakat miskin untuk keluar dari kemiskinan. Grameen Bank melalui pinjaman terhadap kelompok miskin, wanita dan masyarakat buta huruf mengajari bagaimana menginvestasikan uang, menghasilkan pendapatan dan melalui pinjaman meningkatkan pendapatan. Berdasarkan penelitian, selama 8 tahun, 50 % penduduk termiskin Bangladesh yang mendapatkan kredit Grameen Bank dapat meningkatkan pendapatan mereka. Sementara hanya 4 % penduduk miskin Bangladesh yang tidak mendapatkan kredit Grameen Bank yang mampu beranjak dari garis kemiskinan. Di Pulau Lombok Indonesia, nasabah kredit mikro dari BRI mampu meningkatkan pendapatannya rata-rata sampai 112% dan 90 % di antaranya berhasil naik dari garis kemiskinan (Globalisation Research Institute, 2006).

Yunus menekankan perbedaan yang sangat mendasar antara LKM dan dana bantuan pembangunan. LKM bukan solusi top down untuk mengentaskan kemiskinan, tetapi merupakan pendekatan bottom up untuk mengentaskan kemiskinan, mengakomodir aspirasi dan kemampuan masyarakat lapisan bawah. Stephen Daley dan Frederic Sautet dalam makalahnya "Micro Finance in Action: The Philippine Experience" menyatakan bahwa LKM merupakan pilihan (bagi penduduk miskin) karena lembaga-lembaga keuangan formal di banyak negara tidak dapat menjangkau penduduk miskin. Dalam makalah mereka, Daley dan Sautet menjelaskan bahwa terdapat empat masalah kelembagaan yang fundamental di Filipina, yaitu diskriminasi hukum, aturan yang berlebihan, penyakit korupsi dan terabaikannya hak-hak kepemilikan. Menurut keduanya, masalah fundamental ini tidak hanya terjadi di Filipina tetapi di sebagian besar negara berkembang, terutama yang paling berat terjadi di negara-negara Afrika yang menyebabkan jumlah penduduk miskin sangat besar.

Pemerintahan yang buruk di negara-negara berkembang dinyatakan Daley dan Sautet sebagai penyebab utama diskriminasi hukum, aturan yang berlebihan dan korupsi. Chinua Achebe dalam tulisannya menyatakan bahwa Nigeria merupakan negara yang gagal

karena kegagalan kepemimpinan. Ide pemberian bantuan untuk penyelenggaraan pemerintahan yang memenuhi standar di negara - negara berkembang tampaknya tidak lagi relevan, disebabkan bantuan tersebut seringkali disalahgunakan oleh pemerintahan yang korup. Pemutusan bantuan diharapkan akan berdampak positif terhadap pemerintah, yaitu lebih tergantung pada masyarakatnya untuk pendapatan dan secara teoretis akan meningkatkan iklim demokrasi dan rasa tanggungjawab pemerintah.

LKM merupakan sarana untuk mengentaskan kemiskinan. Jika masyarakat berada di atas garis kemiskinan, maka pemerintah akan lebih berhati-hati untuk melakukan tindak korupsi, karena masyarakat yang lebih mampu secara financial akan lebih kritis terhadap tindakan pemerintah. LKM bukan hanya skim kredit untuk memberdayakan masyarakat tetapi juga merupakan sarana yang membantu masyarakat menolong dirinya sendiri dan mendorong pengelolaan pemerintahan yang lebih bersih. Makalah ini akan mendeskripsikan bagaimana peran LKM dalam mengentaskan kemiskinan di berbagai negara termasuk Indonesia.

1. Pembahasan

LKM dapat dipandang dari tiga sisi. Sisi pertama, dilihat dari fungsinya, LKM merupakan kegiatan untuk menyediakan berbagai pelayanan keuangan simpanan dan pinjaman dengan menggunakan sistem dan proses perbankan yang tidak konvensional/tradisional. Sisi kedua, dilihat dari objek sasarannya, LKM ditujukan pada kelompok masyarakat miskin dan pengusaha kecil/mikro yang tidak dapat mengakses lembaga keuangan formal. Sisi ketiga, dilihat dari formalitas kelembagaan, LKM dapat merupakan lembaga formal, semi formal dan non formal yang melaksanakan keuangan mikro.

Beberapa definisi mengenai kemiskinan dapat diuraikan sebagai berikut. Menurut Biro Pusat Statistik dan Departemen Sosial (2002), kemiskinan adalah "ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak " atau "sebuah kondisi yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan, yang disebut garis kemiskinan (poverty line) atau batas kemiskinan (poverty threshold). Garis kemiskinan adalah sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara 2100 kilo kalori per orang per hari dan kebutuhan non-makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya". Secara lebih khusus, Departemen Sosial (2001) memberikan definisi mengenai fakir miskin, yaitu "orang yang sama sekali tidak

mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan

Ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi hak-hak dasar secara umum berkaitan dengan kegagalan kepemilikan aset terutama tanah dan modal; terbatasnya jangkauan layanan dasar terutama kesehatan dan pendidikan; terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung; rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal masyarakat; lemahnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik; pemanfaatan sumberdaya alam yang berlebihan, tidak berwawasan lingkungan dan kurang melibatkan masyarakat; kebijakan pembangunan yang bersifat sektoral, berjangka pendek dan parsial; serta lemahnya koordinasi antar instansi dalam menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar.

Hak-hak dasar juga terdiri dari hak-hak yang dipahami masyarakat miskin sebagai hak mereka untuk dapat menikmati kehidupan yang bermartabat dan hak yang diakui dalam peraturan perundang-undangan. Hak-hak dasar yang diakui secara umum antara lain terpenuhinya pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial ekonomi dan politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Hak-hak dasar tidak berdiri sendiri tetapi saling mempengaruhi satu sama lain sehingga tidak terpenuhinya satu hak dapat mempengaruhi pemenuhan hak lainnya.

Sedangkan menurut Suharto (2004) : kemiskinan pada umumnya didefinisikan dari segi pendapatan dalam bentuk uang ditambah dengan keuntungan-keuntungan non-material yang diterima oleh seseorang. Secara luas kemiskinan meliputi kekurangan atau tidak memiliki pendidikan, keadaan kesehatan yang buruk, kekurangan transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Secara lebih khusus, Departemen Sosial (2001) memberikan definisi mengenai fakir miskin, yaitu "orang yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan"

Friedman (2004) mendefinisikan kemiskinan secara lebih rinci yaitu:

"ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasikan basis kekuasaan sosial. Basis

kekuasaan sosial meliputi: (a) modal produktif atau asset (tanah, perumahan, alat produksi, kesehatan), (b) sumber keuangan (pekerjaan, kredit), (c) organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama (koperasi, partai politik, organisasi sosial), (d) jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang, dan jasa, (e) pengetahuan dan keterampilan, dan (f) informasi yang berguna untuk kemajuan hidup".

Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang bersifat pokok yaitu makanan, pakaian, perumahan, kesehatan, pendidikan disebabkan ketidakmampuan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial berupa modal produktif, sumber keuangan, organisasi sosial dan informasi untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan hidup.

Seperti telah diuraikan sebelumnya, bahwa LKM di dunia yang dianggap telah berhasil mengentaskan kemiskinan adalah Grameen Bank di Bangladesh yang didirikan oleh Prof. Mohammad Yunus, bahkan karena keberhasilannya Yunus dianugerahi hadiah nobel. Maka Grameen Bank akan terlebih dahulu dijelaskan sebagai berikut. Grameen Bank di Bangladesh mencari obyek sasaran masyarakat miskin. Masyarakat miskin sangat efektif melakukan mobilisasi anggota masyarakat miskin lainnya untuk membuat kelompok-kelompok di antara mereka. Setiap anggota kelompok bersedia menanggung biaya pembentukan kelompok, pelatihan dan pengawasan kegiatan usaha yang dilakukan kelompok. Masyarakat miskin yang dijadikan nasabah Grameen Bank cukup puas dengan sejumlah kecil pinjaman yang mereka peroleh. Mereka dengan jujur membayar pinjaman tersebut dengan harapan suatu saat dapat mencapai tujuan utama yaitu peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi.

Pada praktiknya, Grameen Bank lebih memilih para perempuan dari pada laki-laki sebagai sasaran utamanya. Melalui pinjaman terhadap perempuan, Grameen secara langsung memberikan kreditnya pada kelompok paling miskin dan paling kurang berdaya di masyarakat dengan tujuan perempuan dapat secara efektif membantu memperbaiki standar kehidupan keluarganya. Prinsip dasar Grameen Bank, dalam upaya keluar dari kemiskinan dan melepaskan diri dari lintah darat dan perantara (calo kredit), orang miskin harus dipersatukan. Baik para petani, peternak pedagang bahkan pengemis harus dipersatukan. Mereka semua tidak memiliki modal sehingga sangat membutuhkan kredit berapapun jumlahnya untuk memulai usaha, sedangkan di Bangladesh berlaku aturan dasar perbankan yaitu tidak ada pinjaman bila tidak ada jaminan (di pedesaan biasanya berupa tanah).

Di Bangladesh, Grameen Bank beroperasi dengan cara membangun unit-unit LKM. Satu unit LKM dipimpin oleh seorang manager lapangan, dengan sejumlah pegawai dan

wilayah operasinya terdiri dari 15 sampai 22 buah desa. Manager dan pegawai memulai pekerjaan mereka dengan mensosialisasikan keberadaan LKM kepada penduduk desa. Mereka memperkenalkan diri pada para penduduk setempat dimana mereka akan bekerja, mengidentifikasi calon nasabah potensial, dan menjelaskan tujuan, fungsi dan cara kerja LKM.

Pada tahap awal, dibentuk satu kelompok percobaan yang terdiri dari 5 orang calon nasabah potensial. Dalam tahap pertama hanya dua orang dari mereka yang dinyatakan berhak untuk memperoleh pinjaman. Kelompok ini diamati selama satu bulan untuk melihat apakah para anggotanya melaksanakan peraturan yang telah ditentukan oleh Grameen Bank. Para anggota yang lain baru berhak memperoleh pinjaman, bila dua orang pertama sudah membayar kembali pinjamannya berikut bunga, dalam jangka waktu 10 minggu (total waktu pembayaran 52 minggu). Dengan demikian akan timbul tekanan dari anggota kelompok lainnya, agar setiap anggota memenuhi semua peraturan. Dengan cara ini pula, tanggung jawab bersama dari suatu kelompok berperan sebagai jaminan pinjaman. Pendekatan pinjaman melalui kelompok cukup efektif dilakukan oleh Grameen Bank di Bangladesh.

Kesuksesan LKM di Bangladesh, melalui Grameen Bank kemudian mengilhami negara lainnya untuk mengadopsi sistem yang sama. Tetapi perlu diingat bahwa situasi dan kondisi pada setiap negara berbeda sehingga Grameen Bank tidak dapat secara identik ditiru (cloning) di luar Bangladesh, meskipun mempunyai kesamaan status sebagai negara berkembang. Terdapat perbedaan budaya, sejarah dan hukum pada setiap negara berkembang yang harus dipertimbangkan. Oleh karena itu diperlukan serangkaian eksperimen pada suatu daerah tertentu untuk mencari bentuk LKM yang sesuai. Perlu diperhatikan pula bahwa kesuksesan LKM atas dukungan dari masyarakat bawah bukan dari pemerintah, oleh karena itu bentuk LKM yang sesuai sangat ditentukan oleh karakteristik masyarakat setempat. Sebagai contoh, di Kenya Afrika, terdapat 500 jenis LKM yang berbeda. Jenis LKM yang berbeda disesuaikan dengan budaya masing-masing tempat di Afrika.

Model perbankan pedesaan (Village banking) di tempat terpencil di Afrika sesuai untuk masyarakat miskin pedesaan, disebabkan akses terhadap LKM sangat terbatas. Jika LKM dibuka di wilayah geografis yang lebih luas, maka kemungkinan hanya dapat diakses oleh masyarakat *miskin elit*. Dengan pembukaan LKM di daerah terpencil, maka dapat dijangkau lebih luas oleh masyarakat miskin di tempat-tempat terpencil.

LKM seringkali dikritik belum berhasil menciptakan lembaga untuk masyarakat bebas (institutions of a free society). LKM belum berhasil mengungkap akar penyebab kemiskinan, baru merupakan lembaga yang berfungsi untuk mengatasi kemiskinan. Tetapi

Tom Clougherty (2007) berpendapat bahwa praktik *village banking model* merupakan lembaga yang *ril* dan *valuable*. Artinya, peningkatan akses terhadap produk perbankan yang dilakukan LKM telah berhasil membantu masyarakat tumbuh dan *kemakmuran*. Akses terhadap produk perbankan memainkan peran penting untuk meningkatkan pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat. Village bank merupakan cara yang sangat baik untuk menjual produk - produk perbankan pada masyarakat miskin pedesaan.

Konsumen LKM adalah *shareholders* yang diajak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan sesuai dengan kebutuhan mereka. Sebagai contoh, mengenai hak-hak kepemilikan di Afrika, sangat sulit untuk direalisasikan secara formal, tetapi dapat diwujudkan dengan cara informal. Menurut William Easterly, "as piecemeal solutions to deal with particular problems as they arose" *The (White Man's Burden*, New York: Penguin, 2006, p.93). Pengambil kebijakan selanjutnya mempertimbangkan proses untuk memformalkan hak - hak kepemilikan. LKM membantu masyarakat meningkatkan nilai ekonomis tanah mereka, membuat biaya transaksi dari formalisasi hak kepemilikan tanah lebih efektif dan membuat status hak kepemilikan masyarakat menjadi lebih kuat. Dengan demikian keberadaan LKM dalam bentuk *village bank* menjadi penting karena dapat beradaptasi dengan kebutuhan, preferensi masyarakat setempat, dan masalah hak-hak kepemilikan.

Di berbagai negara di dunia, beragam inovasi dilakukan LKM dalam bidang pertanian. Keberadaan LKM menjadi penting disebabkan bidang pertanian berkembang menjadi lebih padat modal dalam 30 tahun terakhir. Seperti peningkatan penggunaan input pupuk, pestisida, listrik dan bahan bakar yang mencapai 87 %. Peningkatan penggunaan input mengakibatkan petani memerlukan akses kredit. Di sisi lain, lembaga keuangan mikro melakukan pendekatan tradisional untuk para petani dengan sejumlah alasan. Alasan pertama, LKM memfokuskan pada masalah kemiskinan dengan sasaran nasabah masyarakat termiskin dan paling membutuhkan (di wilayah pedesaan, petani yang mempunyai tanah tidak termasuk sasaran LKM). Sebagai contoh, Grameen Bank tidak menawarkan produknya untuk petani yang mempunyai tanah lebih dari setengah hektar.

Sebenarnya, pertanian yang sangat tergantung pada alam menyebabkan petani bukan nasabah ideal untuk LKM. Masalah musim berarti bahwa para petani akan memerlukan pinjaman pada saat yang bersamaan, sehingga pada saat bersamaan LKM harus menyediakan jumlah pinjaman cukup besar. LKM akan berhadapan dengan sistem pembayaran yang cukup sulit, disebabkan petani tidak dapat membayar mingguan, atau bulanan melainkan pasca panen. Di sisi lain, pertanian tradisional merupakan usaha yang sangat tidak pasti disebabkan

serangan hama maupun cuaca buruk. Jika ini terjadi, maka hal ini merupakan hal sangat buruk, karena LKM berada di wilayah yang sangat kecil (tidak ada alternative kondisi lain yang membantu). Oleh karena itu di Afrika dan di negara-negara lain dengan basis pertanian tradisional, LKM menjadi sulit berkembang.

Namun demikian, menghadapi situasi demikian, LKM di Afrika mempunyai strategi khusus. Sebagai contoh, pembayaran dengan sistem "balloon payments". Maksudnya bunga pinjaman dan sebagian kecil pinjaman pokoknya dibayar rutin, sedangkan pembayaran sisanya dengan sistem lump sum "balloon payments". Para petani dapat menunda pembayaran sisanya sampai panen dan menjual hasil produknya. LKM pun mendiversifikasi operasinya dengan menawarkan microleasing microinsurance dan microcredit tradisional. (Vijay Mahajan and NV Ramana, *Agricultural Finance by Micro.finance Institutions: Problems and the Way Forward*)

Selain microcredit, microleasing dan microinsurance ternyata juga cukup efektif dilakukan di pedesaan negara-negara berkembang, di antaranya untuk para petani. Microleasing merupakan langkah selanjutnya sesudah microcredit. Untuk membayar microcredit, para petani memerlukan peralatan untuk mendukung operasional pertaniannya sehingga berhasil baik. Masalahnya, harga peralatan biasanya cukup mahal yang cukup berisiko jika dibeli oleh petani dan dibelikan (dengan pinjaman) oleh LKM. Pinjaman untuk kelompok pun sulit dilakukan sebab tidak ada kesanggupan untuk menjamin kelangsungan pembayaran di antara anggota kelompok. Tekanan social selama ini digunakan LKM untuk menggantikan fungsi collateral. Tetapi dalam sistem kelompok ini tidak dapat digunakan sebab harga peralatan terlalu tinggi. Mengatasi hal ini, LKM mengeluarkan strategi skim micro leasing.

Microleasing merupakan skim jangka menengah sampai jangka panjang yang biasa digunakan untuk pembelian peralatan atau mesin, tetapi microleasing juga dapat digunakan untuk pembelian atau sewa tanah pertanian. Prosedur yang ditempuh, LKM membelikan mesin yang dipilih nasabah, nasabah dapat menggunakan mesin dalam periode tertentu sesuai perjanjian. Untuk pembayaran penggunaan mesin, nasabah membayar (semacam sewa) sejumlah tertentu kepada LKM sebagai pemilik mesin. Sesudah periode penggunaan selesai, nasabah diberi kesempatan untuk membeli dengan harga yang lebih murah. Jika tidak LKM akan menariknya dan kemudian menyewakan kepada nasabah lainnya.

Keuntungan dari microleasing, pertama dengan keterbatasan keuangan nasabah dapat menggunakan mesin berteknologi. Kedua, LKM dapat menarik mesin miliknya sewaktu- waktu jika nasabah tidak mampu membayar. Dengan kedua jenis skim ini risiko

LKM dapat diminimisasi. Kedua skim ini dibuat untuk perorangan sehingga mengefisienkan biaya penagihan karena pihak LKM tidak perlu bertemu dengan seluruh anggota kelompok.

Persoalan yang sering dihadapi para petani adalah fluktuasi harga. Harga produk pertanian seringkali murah ketika panen, dan ketika harga tinggi para petani belum masanya panen. Masalah ini terutama dihadapi oleh petani di Sahara Afrika di mana harga produk pertanian biasanya sangat rendah ketika masa panen, pada kondisi demikian para petani tidak dapat mengendalikan harga dan terpaksa menjual produknya dengan harga sangat rendah karena mereka tidak mempunyai teknologi untuk mengawetkan basil panen.

Persoalan ini menjadi tantangan bagi LKM untuk membantu masyarakat miskin. Proyek Kredit Persediaan Ghana pada tahun 1989 merupakan contoh yang baik. Proyek LKM tersebut memfasilitasi sistem penerimaan pergudangan dan kredit persediaan untuk para petani kecil di Ghana. Para petani dalam proyek tersebut dikumpulkan dalam satu kelompok yang terdiri dari 20 sampai 50 orang untuk menyimpan basil produksi mereka di LKM. Hasil produksi diurutkan berdasarkan daya tahannya (kemudahan rusak), para petani kemudian menerima bukti penyimpanan kuantitas dan kualitas produk yang mereka titipkan. Pada awal penitipan, kelompok dapat menerima sekitar 70 % sampai dengan 80 % dari harga pasar yang kemudian dibagikan kepada anggota secara proporsional. Anggota dapat mengambil uang bagiannya jika mereka membutuhkan, tetapi juga dapat menunggu ketika harga mulai naik. Jika petani berniat menjual produknya ketika harga naik, ia dapat mengambil produknya di LKM dan mengembalikan uang yang sudah ia terima. Jika petani tidak berniat menjual, maka produk yang dititipkan akan menjadi jaminannya di LKM atas uang yang sudah ia terima.

Di beberapa komunitas pedesaan negara berkembang, jasa kredit mikro sangat terbatas. Keterbatasan ini terutama mengenai ketersediaan asuransi usaha pertanian dan kehidupan petani. Para petani di negara berkembang sangat terancam dengan iklim, oleh karenanya sangat membutuhkan asuransi. LKM yang sudah mengaplikasi asuransi ini adalah Lombard Insurance Co, BASIX di India yang bekerjasama dengan Bank Dunia (The World Bank Group, Agricultural Investment Sourcebook). Berdasarkan data curah hujan dan crop selama 30 tahun terakhir, BASIX menemukan hubungan antara curah hujan dan produksi kacang tanah, crop. Tahun 2003 - 2004 BASIX menjual sekitar 230 produk asuransi pertanian yang melindungi 3,2 juta rupee India. Total premi yang dibayarkan sejumlah INR 96000, dengan klaim sejumlah INR 42000 untuk 154 petani. Proyek ini kemudian diulang tahun 2004-05 dengan sampel lebih dari 18000 petani. Di tahun yang sama, BASIX mengasuransikan portofolia pinjaman cropnya sejumlah 17 juta rupee pada Lombard Insurance Co dengan premi INR 750000. Asuransi ini juga melindungi portofolio 3 cabang

usaha BASIX lainnya yang berisiko dengan curah hujan. Di tahun tersebut cuaca baik, sehingga tidak ada klaim. Dari fenomena ini, dapat dilihat bahwa petani sebenarnya dapat mengalihkan risiko mereka karena alam kepada pihak asuransi.

Risiko asuransi dapat sangat bervariasi di berbagai tempat, misalnya risiko dapat sangat berbeda untuk wilayah India dibandingkan dengan Afrika, tetapi dengan perbedaan risiko justru risiko dapat dikurangi. Menurut Vijay Mahajan dan NV Ramana dari BASIX, "melalui LKM yang menyediakan asuransi cuaca, dan pinjaman pertanian maka risiko dapat dikurangi dengan cara menggabungkannya dengan berbagai risiko di wilayah lain" (Mahajan and Ramana, *Agricultural Finance*,). LKM masih dapat memperoleh keuntungan karena portofolionya, yaitu premi dari wilayah yang tidak mengajukan klaim. Terlihat bahwa sebenarnya LKM menjadi lembaga perantara dari para petani di berbagai wilayah untuk saling membantu. Hal ini merupakan contoh bahwa LKM dapat mengatasi persoalan termasuk persoalan risiko yang dihadapi oleh para petani.

Asuransi mikro berpotensi tumbuh dengan baik dalam sector industry LKM, dan tidak terbatas hanya untuk sector pertanian. LKM dalam tahun terakhir ini bahkan juga memberikan asuransi kesehatan, seperti yang dilakukan oleh K - Rep Development Agency's di Kenya . LKM ini menyediakan asuransi untuk masyarakat berpenghasilan rendah, dan mereka berhasil dengan asuransi ini. Produk yang ditawarkan adalah perlindungan *Afya_in_patient* , *Afya in and out patient*, dan *Afya Maisha_in* untuk nasabah dari perusahaan.

K-Rep merealisasikan bahwa nasabah dari kalangan berpendapatan rendah tidak hanya mampu membayar premi asuransi sekali saja, tetapi mereka ternyata dapat mengembangkan skim *Afya Loan*. LKM ini meminjami nasabah untuk membayar 10 bulan premi asuransi. Jumlah premi yang mereka bayarkan merupakan pembayaran awal pinjaman, bunga pinjaman dibayar mingguan. 40 % dari peserta asuransi juga mengambil *Afya Loan*. Di Kenya, LKM ini semakin tumbuh dan memperoleh pasar sangat besar.

Jumlah penduduk miskin di Indonesia saat ini masih cukup besar, dalam Tabel tercatat pada tahun 2006 jumlah penduduk miskin sudah mencapai sebesar 39,30 juta dibandingkan dengan tahun 2005 sebesar 35,10 juta. Hal ini berarti antara tahun 2005 sampai dengan 2006 kenaikan penduduk miskin sebesar 4,2 juta atau 11,97% dari tahun 2005 ke tahun 2006.

Lebih rinci dan pasti BPS menyatakan bahwa penduduk miskin adalah penduduk yang mempunyai pendapatan per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sementara garis kemiskinan adalah batas pengeluaran yang terdiri dari pengeluaran untuk pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan. Jika pendapatannya di bawah Rp. 166.697

per kapita per bulan (garis kemiskinan pada Maret 2007), maka seseorang dikatakan miskin. Jumlah penduduk miskin dan prosentase penduduk miskin dari tahun 1996 sampai dengan 2006 dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini.

Tabel 1 Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Tahun 1996-2006

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin
1996	34,01 juta
1999	47,97 juta
2002	38,40 juta
2005	35,10 juta
2006	39,30 juta

Sumber: Berita Resmi Statistik No. 38/07/Th.X, 2 Juli 2007

Lembaga keuangan mikro dan kemiskinan menurut Wijono (2005), secara hipotesis mempunyai hubungan sangat erat. Menurut Wijono, pemberian kredit mikro merupakan upaya pengentasan kemiskinan, karena kredit mikro merupakan sarana bagi orang yang akan menjadi pengusaha pemula. Jika pengusaha pemula ini tumbuh dan berkembang, maka kemiskinan akan terentaskan. Pengentasan ini disebabkan pengusaha pemula menjadi pengusaha yang berhasil atau karena *trickle down effect* dari semakin banyaknya pengusaha mikro (Krisna Wijaya: 2005).

Menurut Marguiret Robinson (2000), pinjaman dalam bentuk *micro credit* merupakan salah satu upaya yang efektif dalam menangani kemiskinan. 3 Klasifikasi masyarakat miskin menurut Marguiret adalah: pertama, masyarakat yang sangat miskin (*the extreme poor*) yakni mereka yang tidak berpenghasilan dan tidak memiliki kegiatan produktif, kedua, masyarakat yang dikategorikan miskin namun memiliki kegiatan ekonomi (*economically active working poor*), dan ketiga, masyarakat yang berpenghasilan rendah (*lower income*) yakni mereka yang memiliki penghasilan meskipun tidak banyak.

Menurut Marguirret (2000) pendekatan yang digunakan untuk pengentasan kemiskinan berbeda-beda untuk ketiga kelompok masyarakat tersebut agar sasaran pengentasan kemiskinan dapat tercapai dengan optimal. Bagi kelompok pertama yaitu *extremely poor*, akan lebih tepat jika digunakan pendekatan pengentasan kemiskinan langsung berupa program subsidi kebutuhan pokok seperti pangan, air, obat-obatan, atau penciptaan lapangan pekerjaan. Namun dernikian perlu diperhatikan bahwa, ketika pinjaman

diberikan kepada mereka kelompok ini, kemungkinan besar pinjaman tersebut tidak akan pernah kembali. Hal ini wajar saja, mengingat mereka (the extreme poor) tidak berpenghasilan dan tidak memiliki kegiatan produktif. Jika mereka sudah terpenuhi kebutuhan pokoknya, baru sedikit demi sedikit diberi bantuan berupa modal untuk meningkatkan lagi kesejahteraan ke tingkat berikutnya, sehingga tidak lagi berada di bawah garis kemiskinan. Sedangkan bagi kelompok kedua dan ketiga, yaitu kelompok yang sudah memiliki pendapatan tetapi masih kurang memadai lebih efektif jika digunakan pendekatan tidak langsung misalnya kesempatan untuk berwirausaha dengan pemberian modal pinjaman mikro dan penciptaan iklim kondusif untuk usaha. Kelompok ketiga yaitu kelompok miskin teratas yang ingin meningkatkan lagi pendapatannya sehingga terlepas sama sekali dari kategori miskin, mulai ditawarkan produk jasa keuangan berupa jasa simpanan untuk memenuhi kebutuhan di luar kebutuhan pokok, seperti tabungan untuk pendidikan dan kesehatan.

Pembukaan akses seluas-luasnya kepada masyarakat miskin melalui Lembaga Keuangan Mikro dipandang mampu memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin agar tidak terus-menerus terbelenggu dalam kemiskinan. Krishnamurti (2003), menyebutkan bahwa tanpa akses yang cukup pada lembaga keuangan mikro, hampir seluruh rumah tangga miskin akan bergantung pada kemampuan pembiayaannya sendiri yang sangat terbatas atau pada kelembagaan keuangan informal seperti rentenir, tengkulak ataupun pelepas uang. Kondisi ini akan membatasi kemampuan kelompok miskin berpartisipasi dan mendapat manfaat dari peluang pembangunan. Dengan adanya akses pendanaan/modal dari LKM, masyarakat miskin akan memperoleh kesempatan mengembangkan usahanya dan masyarakat miskin mendapat kesempatan untuk membuka usaha. Kesempatan mengembangkan dan membuka usaha ini akan berdampak pada terciptanya kesempatan kerja baru.

Walaupun biaya atas dana pinjaman dari LKM lebih tinggi sedikit dari tingkat bunga perbankan, LKM memberikan kelebihan misalnya berupa tiadanya jaminan/agunan seperti yang dipersyaratkan oleh perbankan bahkan dalam beberapa jenis LKM pinjaman didasarkan pada kepercayaan karena biasanya peminjam beserta aktivitasnya sudah dikenal oleh LKM, kemudahan yang lain adalah pencairan dan pengembalian pinjaman yang fleksibel yang juga sering disesuaikan dengan cash flow peminjam.

Menurut Deutsche Bank Research (Desember 2007), dibandingkan dengan LKM di seluruh dunia, BRI berada di peringkat 5 di bawah Grameen Bank Bangladesh, ASA Bangladesh, VBSP Vietnam dan BRAC Bangladesh dengan jumlah peminjam aktif 3455894 orang, total pinjaman USD 3,035,685,400 , Return On Equity 129.96%, Write off Ratio

0.83% dan rata-rata pinjaman USD 878. Dilihat dari jumlah peminjam, LKM di Indonesia berada pada peringkat 3 di bawah Bangladesh dan India dengan jumlah penduduk 221 juta jiwa, penduduk miskin 59,9 juta, jumlah peminjam LKM 6,42 juta dan tingkat penetrasi peminjam dibandingkan penduduk miskin 11 %.. Namun ini juga berarti masih 89 % penduduk miskin yang belum dapat mengakses LKM. Fungsi intermediasi LKM sebagai lembaga keuangan di Indonesia masih sangat terbatas dan berimplikasi perannya untuk pengentasan kemiskinan tentu masih jauh dari optimal.

Perkembangan LKM di Indonesia, seperti diuraikan di atas disebabkan LKM masih dihadapkan pada berbagai kendala baik hambatan internal LKM maupun kondisi eksternal LKM yang kurang kondusif. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh LKM adalah aspek kelembagaan, yang antara lain mengakibatkan bentuk LKM beraneka ragam. BRI Unit dan BPR sebagai bagian dari LKM secara kelembagaan lebih jelas karena mengacu pada ketentuan perbankan dengan pembinaan dari Bank Indonesia, sehingga LKM jenis ini lebih terarah bahkan terjalin kepercayaannya karena merupakan bagian dari kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dan berhak mendapatkan fasilitas dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Sedangkan pada LKM yang berbentuk koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam, segala ketentuan operasional dan arah pengembangannya mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Bahkan, bagi LKM lainnya yang berbentuk Bank Kredit Desa, LDKP, credit union maupun lembaga non pemerintah lainnya tidak jelas kelembagaan dan pembinaannya. Padahal, fungsi LKM tidak berbeda dengan lembaga perbankan formal dalam hal sebagai lembaga intermediasi keuangan, yang didalamnya juga mengembankan kepercayaan dari nasabah atau anggota yang menempatkan dananya. Kondisi kelembagaan yang beragam dan tidak jelas tersebut, akan dapat mempersulit pengembangan LKM di masa mendatang.

Selain masalah eksternal di atas, LKM juga dihadapkan masalah internal yang menyangkut aspek operasional dan pemberdayaan usaha. Masalah pertama menyangkut kemampuan LKM dalam menghimpun dana, sebagian besar LKM masih terbatas kemampuannya karena masih bergantung sedikit banyaknya anggota atau besaran modal sendiri. Kemampuan SDM LKM dalam mengelola usaha sebagian besar masih terbatas, sehingga dalam jangka panjang akan mempengaruhi perkembangan usaha LKM bahkan dapat menghambat.

Berpijak pada kondisi dan permasalahan LKM di atas, maka berikut adalah upaya-upaya yang dapat dilakukan guna mengembangkan LKM. Keberadaan LKM tersebar di

berbagai bidang dengan instansi pembina yang berbeda-beda mulai dari Bank Indonesia, Departemen/Dinas Perkoperasian dan UKM hingga pemerintah daerah. Kondisi ini terjadi karena belum ada ketentuan yang mengatur secara jelas keberadaan LKM, walaupun ada masih parsial. Kelembagaan ini sangat penting karena secara hukum akan melandasi operasional mereka, namun harus dihindari dengan adanya ketentuan akan menghambat perkembangan LKM itu sendiri. Upaya yang saat ini sedang dilakukan oleh pemerintah dengan merancang Rancangan Undang-Undang tentang LKM hendaknya dilakukan secara intensif dan mendalam dalam arti muatan RUU ini harus mencerminkan karakteristik LKM di Indonesia, agar tujuan yang diinginkan tercapai.

Aspek lain yang perlu diperhatikan, bahwa LKM sebagaimana lembaga-lembaga keuangan formal lainnya menempatkan faktor kepercayaan sebagai hal yang utama dalam perekonomian. Jika Bank Indonesia mempunyai Arsitektur Perbankan Indonesia (API) sebagai blue print dalam mengembangkan dan memperkuat lembaga perbankan menjadi industri keuangan yang tangguh, maka pemerintah hendaknya juga memiliki blue print yang sama dalam pengembangan dan penguatan industri LKM. Kenyataan menunjukkan industri perbankan yang tangguh tidak otomatis mengangkat UKM menjadi lebih besar, karena sangat sedikit porsi pembiayaan yang disediakan untuk pelaku UKM.

Bila LKM sudah diarahkan untuk menjadi lebih kuat, maka harus dilanjutkan dengan dukungan yang lain, misalnya banyak LKM yang mengandalkan penerimaannya dari sumber-sumber pihak ketiga yang mayoritas dari perorangan. Untuk memberi rasa aman dan percaya masyarakat kepada eksistensi LKM wajar jika pemerintah memberikan jaminan atas uang yang telah ditempatkan masyarakat kepada LKM, misalnya semacam jaminan atas simpanan yang ditempatkan para nasabah di lembaga perbankan. Begitu pula dengan kredit yang telah disalurkan kepada masyarakat.

Perkembangan LKM pada dasarnya mengikuti perkembangan aktifitas usaha para pelaku UKM, jika UKM semakin menghasilkan nilai tambah yang semakin besar maka kebutuhan akan pembiayaan bagi UKM semakin besar pula yang berarti pasar usaha LKM semakin terbuka luas. Sehingga usaha-usaha untuk memperkuat UKM menjadi bagian yang tidak terpisahkan jika menginginkan LKM semakin kuat.

Sebagaimana diawal telah diungkapkan, masalah pokok UKM adalah pertama, masih sulitnya akses UMKM pada pasar atas produk-produk yang dihasilkannya, kedua, masih lemahnya pengembangan dan penguatan usaha, serta ketiga, keterbatasan akses terhadap sumber-sumber pembiayaan dari lembaga-lembaga keuangan formal khususnya dari perbankan. Masalah pertama dan kedua yang akan menjadi pusat perhatian, upaya untuk

membuka pasar secara luas terhadap produk-produk UKM merupakan hal yang utama. Begitu pula upaya-upaya pendampingan dalam penguatan dan pengembangan usaha UKM masih terbuka untuk dijalankan.

3. Kesimpulan

Di berbagai negara di dunia terdapat berbagai inovasi implementasi LKM. Pola LKM di setiap negara akan berbeda di setiap negara, disebabkan pola di suatu daerah belum tentu sesuai untuk daerah lainnya. LKM mempunyai kekuatan besar yaitu dapat beradaptasi dan menemukan cara untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapinya. Hal ini juga memperlihatkan bahwa masyarakat miskin bukan untuk disumbang tetapi mereka merupakan nasabah potensial yang membutuhkan jasa pelayanan. Hal ini pun menjawab pertanyaan mengapa LKM lebih berhasil dibandingkan dengan bentuk-bentuk sumbangan. LKM merupakan solusi penghapusan kemiskinan dari bawah. LKM tidak didesain oleh para perencana di tingkat pemerintah, tetapi dilakukan oleh para profesional untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat.

Dengan membantu masyarakat menolong diri mereka sendiri, LKM berdampak signifikan untuk mempromosikan perusahaan dan mengurangi kemiskinan. Meskipun LKM sangat berhasil di Bangladesh dengan Grameen Bank, LKM skala operasi LKM di wilayah lain masih sangat kecil. Untuk di Afrika, Indonesia khususnya LKM masih jauh dari optimal. Perlu dikembangkan lebih lanjut transplantasi LKM di Indonesia khususnya sehingga dapat mencapai keberhasilan seperti yang dilakukan Grameen Bank.

LKM harus tumbuh atas dasar inovasi dan gerakan alamiah lapisan masyarakat miskin. Selain diperlukan pendekatan - pendekatan yang sesuai, LKM pun seharusnya dapat membiayai dirinya sendiri dan terus menjaga kekonsistenan usahanya yang menghasilkan profit. Untuk perolehan modal, LKM harus meningkatkan skala operasinya melalui perluasan pasar, diversifikasi produk sesuai dengan karakteristik nasabah.

Pemerintah dan donor internasional seharusnya mendukung LKM yang konsisten, sehingga dapat memperkuat permodalan LKM, meningkatkan pertumbuhannya melalui bantuan modal atau tenaga ahli. Formalisasi kepemilikan yang menjadi Hernando de Soto juga merupakan hal penting. LKM harus menunjukkan kemampuannya untuk menghapus kemiskinan dan ini dapat dimulai dari formalisasi hak kepemilikan. Oleh karenanya LKM dan hak kepemilikan merupakan pendekatan yang terintegrasi untuk melawan kemiskinan, memberdayakan masyarakat miskin dan membantu mereka mengembangkan potensi mereka.

LKM di Indonesia tidak dapat secara instan dicloning dari Grameen Bank

Bangladesh yang sudah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskinnya, disebabkan perbedaan berbagai karakteristik terutama karakteristik geografis, masyarakat, tatanan sosial, ekonomi, budaya, dan kelembagaan antar negara, meskipun keduanya berstatus sama sebagai negara berkembang. Berbagai karakteristik tersebut, menyebabkan kondisi yang dihadapi LKM di Indonesia memiliki perbedaan dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya baik di Afrika maupun di Asia. Dari pembahasan di atas, kondisi LKM di Indonesia adalah sebagai berikut.

1. Keuangan mikro umumnya dilaksanakan secara informal, baik dilihat dari lembaga pelaksanaannya maupun sumber permodalannya. Mekanisme yang ada dalam keuangan mikro juga sering tidak sistematis sehingga sulit untuk dikonsepsikan secara formal.
2. Jumlah keuangan mikro yang banyak, berskala kecil, cenderung eksklusif pada kelompok sasaran tertentu dan sangat beragam antara satu lembaga dan lembaga lain, baik dalam jenis lembaga, mekanisme kerja, maupun jaringan kerja yang dikembangkan.
3. Tingkat bunga pinjaman dari lembaga keuangan mikro umumnya lebih tinggi dari lembaga keuangan formal.
4. Belum lengkapnya pelayanan yang ditawarkan (misalnya: tabungan, pinjaman (untuk berbagai keperluan termasuk keperluan konsumsi), serta pendampingan teknik dan bisnis).
5. Hubungan keuangan mikro dan kelompok sasarannya berbasis pada kepercayaan. Oleh sebab itu program penjangkauan yang berkesinambungan, proses penerimaan, dan komitmen pelaksana merupakan faktor kunci bagi keberhasilan keuangan mikro.
6. Terdapat kecenderungan perkembangan peran LSM dan swasta (organisasi maupun perorangan) yang mendukung pengembangan keuangan mikro.
7. Terdapat kecenderungan perkembangan peran LSM dan swasta (organisasi maupun perorangan) yang mendukung pengembangan keuangan mikro non bank.
8. Data dan informasi mengenai lembaga keuangan mikro (kecuali yang formal seperti BRI unit dan BPR) masih sangat terbatas.

Pengembangan LKM dalam konteks penanggulangan kemiskinan di Indonesia tidak bisa lepas kaitannya dengan Usaha Mikro Kecil Menengah. Hal ini disebabkan LKM merupakan pihak yang selama ini mampu memberikan dukungan kepada UMKM khususnya dalam hal sumberdaya finansial di saat pihak perbankan komersial tidak mampu menjangkau. Daya jangkau perbankan komersial terbatas karena karakteristik yang melekat pada UMKM sendiri. Kelebihan dari LKM di seluruh dunia (termasuk Indonesia) adalah sifatnya yang sangat adaptif dan fleksibel sehingga mampu dijangkau UMKM. Berangkat dari fenomena ini

maka tidak dapat dipungkiri bahwa pemberdayaan LKM merupakan salah satu prasyarat mutlak yang harus dipenuhi dalam rangka pengembangan UMKM yang diarahkan untuk menanggulangi kemiskinan.

Daftar Pustaka

- Bank Indonesia, 2001. Sejarah Peranan Bank Indonesia dalam Pengembangan Usaha Kecil. Biro Kredit. Bank Indonesia.
- Berita Resmi Statistik No 17/03/Th.X 16 Maret 2007. Perkembangan Indikator Makro UKM Tahun 2007. Badan Pusat Statistik dengan Kementerian Koperasi & Usaha Kecil Menengah
- Clougherty, Tom, Alex Singleton. 2006. *Microfinance: Harnessing enterprise to alleviate poverty*. Globalisation Institut Research Ltd.
- Daya Cipta Dianrancana.2007. Studi Peran LKM dalam Pengentasan Kemiskinan dan Perluasan Kesempatan Kerja di Indonesia.
- Daley, Stephen dan Frederic Sautet. Microfinance in Action: The Philippine Experience. <http://www.mercatus.org/Publications/pubID.2207,cfilter.O/pub-detail.asp>.
- Didin W ahyudin, Key Succes Factors In MicroFinancing, paper pada Diskusi Panel Microfinance Revolution: "Future Perspective for Indonesian Market", Jakarta, 7 Desember 2004.
- Dieckmann, Raimar. 2007. Microfinance: an emerging investment opportunity (Uniting social investment and financial returns) : Deutsche Bank Research, December 2007.
- Krishnamurti, B. 2003. Pengembangan Keuangan Mikro dan Penanggulangan Kemiskinan, Jurnal Ekonomi Rakyat. Artikel- Th. II- No.2- April2003.
- Krishnamurti, B. 2005. Pengembangan Keuangan Mikro bagi Pembangunan Indonesia. Media Informasi Bank Perkreditan Rakyat. Edisi IV Maret 2005.
- Krisna Wijaya.2005. Kredit Mikro Bukan Hi bah. Harian Kompas, Selasa, 1 Maret 2005.
- Ramana, Mahajan. Agriculture Finance by Microfinance Institutions : Problems and The Way Forward dalam *Microfinance : Harnessing enterprise to alleviate poverty*. Globalisation Institut Research Ltd.2006.
- Robinson, Marguirrite. 2000, Beberapa Strategi yang Berhasil Untuk Mengembangkan Bank Pedesaan: Pengalaman dengan Bank Rakyat Indonesia 1970- 1990, dalam Bunga Rampai Pembiayaan Pertanian Pedesaan, Sugianto (Ed.), Penerbit Institut Bankir Indonesia, Jakarta.

Rudjito, 2003, Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Otonomi Daerah Guna Menggerakkan Ekonomi Rakyat dan Menanggulangi Kemiskinan: Studi Kasus Bank Rakyat Indonesia, Jurnal Keuangan Rakyat Tahun II, Nomor I, Maret 2003, Jogjakarta

Wijono Wiloejo Wirjo. 2005. Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional: Upaya Konkrit Memutus Mata Rantai Kemiskinan. Kajian Ekonomi dan Keuangan, Edisi Khusus November 2005

William Easterly .2006. The (White Man's Burden). New York: Penguin